

## Program Pendampingan BUMDes Kabupaten Gresik (Studi Lapangan Kebomas)

Muhammad Faizin\*<sup>1</sup>, Nurul Fadhilah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Gresik

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik

\*e-mail: muhammadfaizin@unigres.ac.id<sup>1</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Pengalangan Kec. Kebomas Kab. Gresik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode mengolah data dengan lebih banyak mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan dan data sekunder yang diperoleh dari kantor Kepala Desa & Kantor BUMDes Pengalangan Sejahtera, dan Website resmi.*

**Kata kunci:** *Pendampingan; Manajemen; BUMDes*

### **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan proses perubahan dari proses perencanaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 78 menyatakan bahwa: 1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa lebih dekat dengan masyarakat. Desa sebagai wakil pemerintah paling depan dalam pembangunan. Makanya kewenangan desa untuk mengelola wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya berdasarkan undang-undang yang berlaku. pemerintah desa diberikan dukungan besar agar desa memiliki badan usaha yang mampu mengembangkan dan menggerakkan perekonomian lokal.

Keberadaan BUMDes sebagai alternatif dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Program BUMDes menunjukkan kontribusi penting dalam peningkatan akses terhadap pelayanan jasa keuangan pada tingkat perdesaan sebagai proses pumutusan mata rantai kemiskinan serta pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan individu. Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji kelebihan dan kelemahan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada perdesaan kawasan pertambangan emas di Kabupaten Gresik.

Dana ini banyak digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan desa, air bersih, MCK, irigasi, PAUD, dan sebagainya. Pemerintah tentu mengharapkan hasil bangunan fisik ini berdampak besar pada akselerasi kemajuan desa, dengan anggaran yang diberikan untuk desa ini, Pemerintah desa sudah melakukan pembangunan desa, tetapi masih ada hasil yang belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan desa seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Tujuan dilakukannya pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta memperbaiki kualitas hidupnya, dengan cara memnuhi kebutuhan dasar seperti pembangunan sarana dan prasarana, dan potensi ekonomi setempat, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian pembangunan desa ini nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional, sekaligus untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, terciptanya kawasan desa yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan- kawasan lain melalui pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan instrumen wawancara secara langsung dengan informan dan melakukan observasi dan didukung dengan data primer dari observasi dilokasi penelitian dan data sekunder melalui website dan data eksternal pemerintah desa pengalangan. Dengan metode deskriptif, kita menghimpun data, menyusun secara sistematis, faktual dan cermat. (Rakhmat, 1995: 22, 27). Yang dimaksud metode kualitatif adalah penelitian yang mengamati fenomena secara menyeluruh, yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara mendeskripsikannya, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2004:6).

Penelitian ini berlokasi di Gresik dimana di Desa ini BUMDes dikelola oleh pemerintah desa pengalangan yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat, dengan harapan output yang dihasilkan ini bisa dirasakan oleh masyarakat desa pengalangan terlebih meningkatkan kesejahteraannya. dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai bahan dan acuan adalah:

Data primer, Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada informan / pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD, Tokoh masyarakat dan masyarakat desa, Data skunder, Selain data primer yang

kita lakukan proses wawancara dengan informan, penulis juga mengumpulkan data melalui *literature* buku dan *website* resmi, serta dokumen-dokumen desa yang ada.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan. Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial.

Pada prinsipnya pendirian BUMDes dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sebagai lembaga sosial BUMDes harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan salah satu ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian pula dengan organisasi BUMDes Pengalangan yang memahami tentang sebuah tujuan dibentuknya organisasi ini,

#### **Tujuan BUMDes Pengalangan Sejahtera**

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai, bahwa tujuan dibentuknya BUMDes Sejahtera ini, untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pengalangan dan juga meningkatkan pendapatan asli desa, dan masih banyak tujuannya yang lainnya, ini juga sudah tertuang PERDES No 3 tahun 2016.

#### **Peraturan BUMDes Pengalangan Sejahtera**

Keefektivan suatu program juga bisa dilihat melalui berfungsinya atau tidak kebijakan yang sudah dibuat Untuk menjaga keberlangsungan suatu program. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pengurus/pegawai

BUMDes dengan anggota BUMDes tersebut Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah berlaku secara efektif, peraturan tentang kepengurusan ini sudah tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 3 Tahun 2017, Tentang Badan Usaha Milik Desa, dan juga pada Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Realitas peraturan dan ketentuan terkait kepengurusan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah mengacu pada peraturan yang ada, hal itu juga tentang prosedur peminjaman di Bank Desa yang memudahkan nasabah untuk melakukan peminjaman dan menabung.

### **Tugas dan Fungsi**

Adapun Tugas dan Tanggung jawab pelaksanaan operasional menurut laporan sebagai berikut:

➤ Ketua

- Memimpin Organisasi BUMDesa.
- Membahas dan menetapkan kelayakan unit usahayang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam

Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.bertindak atas nama lembaga usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan

Pada pelaksanaan sosialisasi manajemen bumdes di Kabupaten Gresik, dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan bersama. Warga masyarakat terutama pengurus bumdes antusias menerima ilmu pengetahuan tentang manajemen bumdes dan menerapkannya. Dalam kegiatan pengabdian ini menitik beratkan tiga (3) hal penting yaitu:

1. Memberi pemahaman kepada peserta tentang tujuan BUMDes. Pada tahapan ini tim pengabdian menshare kepada peserta terkait dengan tujuan BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya.

2. Prinsip manajemen pengelolaan BUMDes. Berdasarkan hasil pengamatan, salah satu sistem manajemen yang pengabdian kemukakan adalah manajemen strategis. Manajemen strategis merupakan perencanaan strategis yang berorientasi pada jangkauan masa depan agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dalam usaha.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pengelolaan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah berjalan dengan Efektif, hal ini bisa dilihat dari beberapa dimensi yang peneliti gunakan yakni: 1. Tujuan dan kondisi ideal, 2. Rencana / program, 3. Ketentuan dan peraturan, 4. Tugas dan fungsi. Hal ini didukung dengan data yang peneliti temukan dilapangan seperti tujuan pembentukan BUMDes Pengalangan Sejahtera ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Perda Gresik No 3 Tahun 2017, dan juga Perdes No 3 Tahun 2016, dari segi perencanaan sudah disusun dengan baik, begitu juga dengan peraturan serta adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agunggunanto, Yusuf Edy, Arianti Fitri, Kushartono Wibowo Edi dan Darwanto, 2016, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 13. No.1 Maret 2016, Hal: 67-81

Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri, 2016, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta, Modus, Vol. 28 (2), Hal: 155- 167

Goma, Subhan, 2017, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/1114-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-meningkatkanpendapatan-di-desa-bolangitang-satu-kec.pdf> Pada tanggal 10 Agustus 2017

Hayyuna, Rizka, Pratiwi, Ratih Nur, Dan Mindati, Lely Indah, 2017, Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik) Mubyarto, 1989, Pengantar Ekonomi Pertanian, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta